

Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Ditinjau Dari Perspektif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Fazl Mawla Febrian¹, Novita Fitria Azzahra², Farchanza Haykanna Pireno³, Satino⁴
Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Email: 2310611031@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611056@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611061@mahasiswa.upnvj.ac.id³, satino@upnvj.co.id⁴

Abstract

"Indonesia Golden 2045" is a big vision with the goal of making Indonesia a developed country by 2045, on the other hand poverty is still a serious problem facing Indonesian society. The government has launched a number of social assistance programmes to reduce the poverty rate and improve the well-being of the population. Despite this, the effectiveness of these programmes is still a matter of debate among several parties. In this context, research into student perspectives on the effectiveness of government programmes in particular Cash Direct Assistance (BLT) in poverty alleviation efforts becomes relevant and important. In order to obtain real comparisons as well as actual information relating to the existence of government social assistance programmes, the data collection system on this study uses an online survey in the form of a questionnaire containing questions about the perspective related to the problems of the BLT program with students of the Faculty of Law of the National University of Development "Veteran" Jakarta (UPNVJ) as the target respondents continued with a review of data from previous sources. The research is expected to provide a more comprehensive understanding of the extent to which government social assistance programmes benefit communities and any obstacles they encounter in their implementation.

Keywords: Direct cash aid, efficiency, poverty.

Abstrak

"Indonesia Emas 2045" merupakan visi besar dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, disisi lain kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian efektivitas dari program-program ini masih menjadi perdebatan di antara beberapa pihak. Dalam konteks ini, penelitian tentang perspektif mahasiswa terhadap efektivitas program pemerintah khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi relevan dan penting. Untuk mendapatkan perbandingan nyata serta informasi aktual terkait eksistensi program bantuan sosial pemerintah, sistem pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei online berbentuk kuesioner berisi pertanyaan mengenai sudut pandang terkait permasalahan program BLT dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) sebagai target responden dilanjutkan dengan peninjauan terhadap data dari sumber terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejauh mana program bantuan sosial pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Kata kunci: Bantuan langsung tunai, efektivitas, kemiskinan.

PENDAHULUAN

"Indonesia Emas 2045" merupakan visi besar dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia diharapkan menjadi negara yang kuat, mandiri, berdaulat, adil, dan sejahtera. Namun, kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam mencapai hal tersebut terkhusus pada bidang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

inklusif. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meninjau dari laman resmi Badan Pusat Statistik, terhitung garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458,-/kapita/bulan dengan rincian komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 74,21% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 25,79%. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Maka dari itu, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga bisa mencapai Rp2.592.657,-/bulan.

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merata di seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan program kesehatan membantu menjaga kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Bantuan sosial merupakan salah satu upaya konkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentas angka kemiskinan di Indonesia. Awal istilah "bansos" mulai muncul dalam konteks penyalurannya kepada masyarakat korban bencana alam dan masyarakat miskin pada akhir tahun 1990-an. Gagasan program bantuan sosial terus berkembang dan berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo. Dalam kurun waktu dua periode masa jabatan sejak tahun 2014 hingga kini, Presiden Ir. H. Joko Widodo meluncurkan beberapa jenis bantuan sosial seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Mitigasi Risiko Pangan, Bantuan Sosial Beras (BSB), dan lain-lain. Sejalan dengan penelitian kami mengenai efektivitas BLT, adapun latar belakang terbentuknya Bantuan Langsung Tunai (BLT) berlangsung pada tahun 2004. Pada saat itu, Indonesia sedang dilanda kenaikan harga bahan pokok yang sangat drastis diakibatkan oleh harga minyak yang naik secara signifikan. Dalam upaya menanggulangi dampak kenaikan harga bagi masyarakat miskin, pemerintah menggalangkan program BLT pada tahun 2005 untuk pertama kalinya. Ketentuan mengenai bansos ini diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada dasarnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas taraf hidup masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang layak dan sejahtera. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang mempengaruhi eksistensi dan kualitas program Bantuan langsung Tunai secara menyeluruh. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian kami berfokus pada tingkat efektivitas pelaksanaan program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) secara umum yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bantuan Langsung Tunai yang digencarkan oleh pemerintah belakangan ini, dapat diharapkan mempercepat pencapaian visi "Indonesia Emas 2045" dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan, guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia juga terikat dengan kewajibannya untuk menangani kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, negara wajib untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Upaya yang harus dilaksanakan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perspektif mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ yang menjadi target responden kami terkait program bantuan sosial khususnya BLT yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta merumuskan solusi yang diajukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas program bansos pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berkaca pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif mahasiswa terhadap efektivitas program Bantuan Sosial dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program Bantuan Sosial dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif mahasiswa?
3. Bagaimana keterkaitan pengentasan kemiskinan dengan sudut pandang mata kuliah Kepemimpinan?

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif mahasiswa terhadap program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Untuk merumuskan solusi yang diajukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas program bansos pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Untuk menganalisis keterkaitan pengentasan kemiskinan dengan sudut pandang mata kuliah Kepemimpinan

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini dikemukakan oleh Rahnar Nurkes (1953) yang mengatakan "*vicious circle of poverty*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan dan kekurangan modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Inti dari teori ini adalah bahwa kemiskinan tidak memiliki pangkal atau ujung, dan setiap komponen penyebab kemiskinan akan berhubungan satu sama lain.

2. Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut penelitian yang dikutip oleh Gunnar Adler Karlsson (Ala, 1981), strategi untuk mengatasi kemiskinan mencakup dua pendekatan utama: pertama, pendekatan jangka pendek yang bertujuan untuk mengalihkan sumber daya kepada individu miskin dengan jumlah yang memadai; kedua, pendekatan jangka panjang yang menekankan pada pemberdayaan lokal. Upaya perbaikan dalam jangka pendek mencakup mengadakan peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Sementara itu, langkah-langkah jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan sosial secara bermartabat (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Sementara itu, upaya penanganan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proppenas terdiri dari dua strategi utama. Strategi pertama terkait perlindungan terhadap keluarga atau kelompok masyarakat miskin. Strategi yang kedua terkait pemberdayaan masyarakat miskin jangka panjang, serta pencegahan terhadap masalah kemiskinan yang akan datang. Langkah selanjutnya, perencanaan ini diimplementasikan melalui tiga program yang ditujukan langsung untuk masyarakat miskin. Program pertama yaitu penyediaan kebutuhan dasar, kemudian pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan usaha masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) dengan asosiasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kuantitatif yang dilakukan berisi kumpulan data secara numerik mengenai isu yang kami analisis. Penelitian ini akan menghasilkan data statistik berdasarkan jumlah responden yang mengisi formulir secara online. Metode penelitian kuantitatif merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara numerik untuk menjelaskan suatu kejadian yang diminati. Sedangkan, metode pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara eksklusif bersama narasumber yang merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Sampel akan dipilih secara acak dari angkatan 2022 dan 2023 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Definisi Operasional

Penilaian responden terhadap isu diukur berdasarkan skala dari “Tidak setuju” hingga “Sangat setuju”. Potensi solusi diukur dengan mengidentifikasi kesimpulan yang didapat menggunakan formulir online.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang mencakup opsi terstruktur untuk mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan, penilaian, dan kemungkinan solusi. Kuesioner akan dibuat dengan mempertimbangkan definisi operasional variabel yang telah dijelaskan.

4. Teknik Pengolahan Data

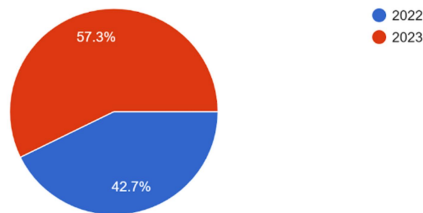
Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti Google Forms. Analisis statistik deskriptif kami gunakan untuk menggambarkan hasil sampel dan survei. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara eksklusif akan diolah dengan analisis kritis yang menghasilkan kesimpulan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun Hasil Penelitian kami terkait perspektif mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta melalui Google Form dengan target 100 responden, yaitu:

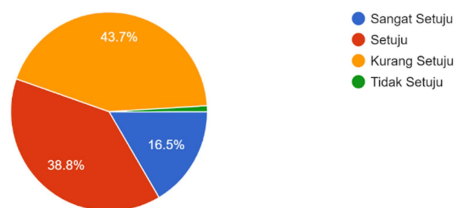
Persentase Responden



Gambar 4.1.1

Berdasarkan gambar 4.1.1 menunjukkan persentase responden mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta angkatan 2022 dengan persentase 42,7% dan angkatan 2023 dengan persentase 57,3%.

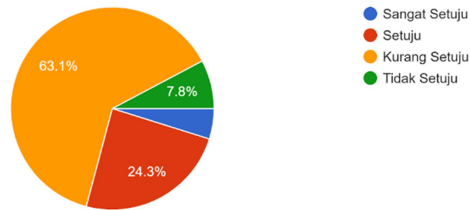
Pertanyaan 1: Menurut Anda, apakah program bantuan sosial pemerintah memiliki pengaruh yang dapat secara signifikan mengentaskan kemiskinan?



Gambar 4.1.2

Berdasarkan gambar 4.1.2 menunjukan rincian hasil persentase survei, yakni 43,7% (Kurang Setuju), 38,8% (Setuju), 16,5% (Sangat Setuju), dan 1% (Tidak Setuju). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika program bantuan sosial pemerintah merupakan program yang belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

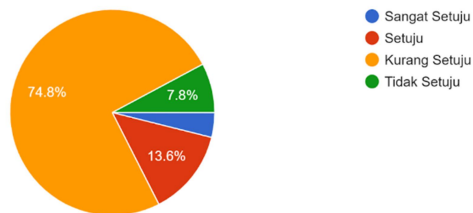
Pertanyaan 2: Menurut Anda, apakah penyaluran bantuan sosial pemerintah berbentuk Bantuan Langsung Tunai sudah tepat sasaran dalam menjangkau target yang benar-benar membutuhkan?



Gambar 4.1.3

Berdasarkan gambar 4.1.3 menunjukkan rincian hasil persentase survei, yakni 63,1% (Kurang Setuju), 24,3% (Setuju), 7,8% (Tidak Setuju), dan 4,9% (Sangat Setuju). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika program Bantuan Langsung Tunai belum sepenuhnya menjangkau target yang benar-benar membutuhkan.

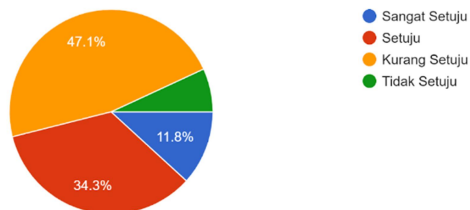
Pertanyaan 3: Menurut Anda, apakah transparansi dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial pemerintah yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai saat ini sudah dilakukan secara maksimal?



Gambar 4.1.4

Berdasarkan gambar 4.1.4 menunjukkan rincian hasil persentase survei, yakni 74,8% (Kurang Setuju), 13,6% (Setuju), 7,8% (Tidak Setuju), dan 3,9% (Sangat Setuju). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika transparansi dan pengawasan terhadap pendistribusian Bantuan Langsung Tunai oleh pihak terkait masih minim dan belum dilakukan secara maksimal.

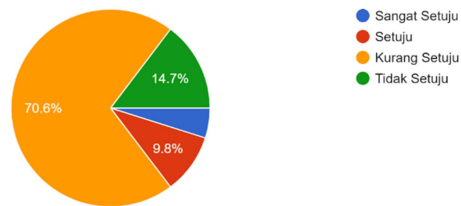
Pertanyaan 4: Apakah Anda merasa bahwa program bantuan sosial pemerintah yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai adalah solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat?



Gambar 4.1.5

Berdasarkan Gambar 4.1.5 menunjukkan rincian hasil persentase survei, yakni 47,1% (Kurang Setuju), 34,3% (Setuju), 11,8% (Sangat Setuju), dan 6,9% (Tidak Setuju.) Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika bantuan sosial pemerintah yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai belum menjadi solusi yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

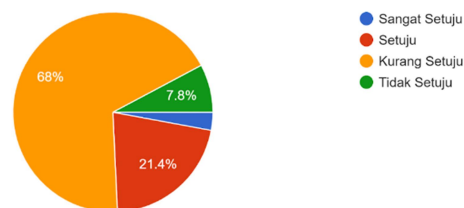
Pertanyaan 5: Apakah Anda merasa bahwa program bantuan sosial pemerintah yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai sudah disalurkan secara merata di setiap daerah di Indonesia?



Gambar 4.1.6

Berdasarkan Gambar 4.1.6 menunjukkan rincian hasil persentase survei, yakni 70,6% (Kurang Setuju), 14,7% (Tidak Setuju), 9,8% (Setuju), 4,9% (Sangat Setuju). Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika bantuan langsung tunai yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum disalurkan secara merata ke setiap daerah di Indonesia.

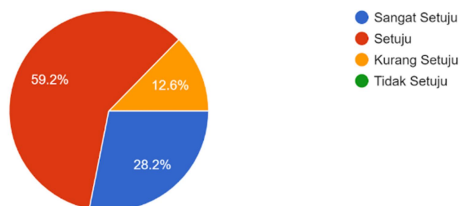
Pertanyaan 6: Berdasarkan fakta yang Anda ketahui, apakah penyaluran Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan secara tepat waktu?



Gambar 4.1.7

Berdasarkan Gambar 4.1.7 menunjukkan rincian hasil persentase survei, yakni 68% (Kurang Setuju), 21,4% (Setuju), 7,8% (Tidak Setuju), 2,8% (Sangat Setuju). Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika bantuan langsung tunai yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum disalurkan dengan tepat waktu.

Pertanyaan 7: Menurut pandangan Anda, apakah keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai adalah suatu permasalahan krusial yang masih disepelekan oleh pihak penanggung jawab?



Gambar 4.1.8

Berdasarkan Gambar 4.1.8 menunjukkan urutan rincian hasil persentase survei, yakni 59,2% (Setuju), 28,2% (Sangat Setuju), 12,6% (Kurang Setuju), dan 0% (Tidak Setuju). Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa jika keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung adalah suatu permasalahan krusial yang masih disepelekan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pertanyaan 8: Tuliskan saran dan kritik anda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial pemerintah (Bantuan Langsung Tunai) di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan!

Berdasarkan tanggapan responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa minimnya transparansi dan pengawasan, serta kurang tepatnya pendataan target penerima menjadi permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan sosial pemerintah (Bantuan Langsung Tunai) di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana perspektif mahasiswa terhadap efektivitas program Bantuan Sosial dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan?

Dari hasil analisis data terhadap pertanyaan dalam survei google form oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, jawaban pertanyaan nomor 1 terkait “Pengaruh bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan” sebagian besar responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 43,7%, respon, pertanyaan nomor 2 terkait “Ketepatan target sasaran” sebagian responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 63,1%, respon, pertanyaan nomor 3 terkait “Maksimal nya transparansi dan pengawasan pendistribusian BLT” sebagian besar responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 74,8%,

pertanyaan nomor 4 terkait “BLT menjadi solusi tepat untuk mengatasi kemiskinan” sebagian responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 47,1%, pertanyaan nomor 5 terkait “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang sudah merata” sebagian responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 70,6%, pertanyaan nomor 6 terkait “Ketepatan waktu penyaluran” sebagian responden menjawab Kurang Setuju dengan persentase 68%, serta pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 7 terkait “Keterlambatan penyaluran adalah permasalahan yang disepelekan” sebagian responden menjawab Setuju dengan persentase 59,2%.

Berdasarkan data dari survei google form yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ, perlu adanya evaluasi dari pemerintah terkait pendataan target penerima Bantuan Langsung Tunai serta peningkatan transparansi dan pengawasan agar terlaksananya efektivitas bantuan sosial pemerintah (Bantuan Langsung Tunai) di Indonesia.

Selain itu, peneliti melakukan komparasi data guna menunjang hasil penelitian kami dengan mengakses informasi melalui situs *online* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data tersebut menunjukkan bahwa program penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa oleh pemerintah daerah mengalami sejumlah masalah. Beberapa masalah itu mulai dari penyaluran yang mungkin tidak sesuai hingga pertanggungjawaban dan pengawasan yang tidak sesuai. Dalam pemeriksaan kepatuhan tahun anggaran 2022 pada 28 pemerintah kabupaten dan lembaga terkait lainnya, BPK menemukan masalah ini.

BPK menemukan permasalahan yang signifikan terkait pengelolaan program perlinsos melalui BLT desa. Pertama, dari 40.921 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa yang ada di 1.288 desa di 26 kabupaten, minimal 9.068 dari mereka, atau 22,16 persen, tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, dengan nilai salur sebesar Rp12,97 miliar. Kemudian, setidaknya 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT desa dengan nilai minimal sebesar Rp 295,81 miliar. Permasalahan ini mengakibatkan hasil pendataan yang berisiko salah sasaran dalam penyaluran BLT Desa. BPK juga mendeteksi permasalahan dalam hal pertanggungjawaban. Realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa atau 21,08% di 22 kabupaten tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti bukti tanda terima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp 27,76 miliar.

Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, BPK menyarankan agar tiap kepala daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh pemerintah desa terkait proses dan tahapan penyaluran BLT kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar tepat, nilai, dan waktu penyaluran bantuan kepada KPM, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

2. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif mahasiswa?

Berdasarkan hasil penelitian dengan sistem survei online dan wawancara yang telah dilaksanakan, kami memperoleh data faktual terkait perspektif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta terhadap beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas program Bantuan Langsung Tunai serta solusi yang dapat dilaksanakan. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan program yang membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat demi penyaluran yang belum terlaksanakan secara maksimal, merata, dan sesuai.

Mayoritas responden merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat mempengaruhi terwujudnya efektivitas program pemerintah Bantuan Langsung Tunai dan memerlukan tindak lanjut mulai dari peningkatan ketegasan pemerintah untuk lebih selektif terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ikut andil dalam penyelenggaraan program agar tidak ada oknum yang melakukan penyelewengan. Tindak lanjut terhadap sistem penyelenggaraan program juga harus diperhatikan dan diperbaiki, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang serta memastikan kebenaran data masyarakat yang akan menerima bantuan serta mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemerintah lain yang mendukung seperti pendidikan dan pelatihan kerja, yang dapat membantu penerima bantuan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Mengalihkan fokus dari bantuan langsung jangka pendek menjadi pemberdayaan jangka panjang yang mendidik dan melatih penerima bantuan untuk mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk secara ekonomi mandiri.

Keterkaitan Pengentasan Kemiskinan dengan Sudut Pandang Mata Kuliah Kepemimpinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, unsur kepemimpinan sangat berperan penting karena para pemimpin memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengambil keputusan serta mengkoordinasikan strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tentu saja, tolak ukur keberhasilan pengentasan kemiskinan bergantung pada bagaimana kemampuan para pemimpin dalam pendalaman kompleksitas isu kemiskinan. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pengentasan kemiskinan mencakup aspek sosial dan ekonomi yang mana menjadi aspek wajib untuk diintegrasikan oleh pemerintah dalam kebijakan yang tepat demi terwujudnya hasil yang positif. Peran unsur kepemimpinan juga ditekankan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, pemerintahan adalah kekuasaan memerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Ini merupakan bagian dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam pilar Pengentasan Kemiskinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ, mayoritas responden cenderung tidak setuju terhadap berbagai aspek terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), seperti efektivitas dalam mengatasi kemiskinan, ketepatan target, transparansi, dan waktu penyaluran. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan dan kurangnya pemahaman dalam hal bantuan sosial. Perbaikan dan evaluasi dari pemerintah, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan sasaran, meningkatkan pertanggungjawaban, dan memastikan penerima manfaat menerima bantuan tepat waktu.
2. Selain Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah perlu melakukan penataan kembali fokus program menuju pemberdayaan jangka panjang, meningkatkan kemandirian ekonomi penerima bantuan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini memerlukan kolaborasi dengan lembaga lain seperti dalam bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan.
3. Dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan, kepemimpinan memegang peran krusial karena kemampuan dan wewenang para pemimpin dalam membuat

keputusan dan mengkoordinasikan strategi yang efektif. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada kedalaman pemahaman para pemimpin terhadap kompleksitas isu ini. Di Indonesia, ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan pentingnya pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

B. Saran

1. Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen perubahan sosial dengan menyebarkan informasi tentang hak-hak masyarakat terkait program bantuan sosial, prosedur pendaftaran, dan mekanisme pengaduan. Edukasi publik ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
2. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengumpulan data dan analisis untuk mengidentifikasi secara lebih akurat masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi yang canggih dan kerja sama dengan lembaga riset dan akademisi untuk menganalisis data dengan lebih mendalam.
3. Dalam konteks kepemimpinan, pengentasan kemiskinan mengacu pada peranan pemerintah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan kewenangan nya, pemerintah seharusnya tidak bergantung hanya pada satu bentuk program serta dapat lebih sigap mengintegrasikan rencana kebijakan diluar program bantuan sosial seperti pembangunan wilayah tertentu, pemberdayaan usaha mikro milik masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin. Dengan pengendalian dan pengawasan yang berkualitas, berbagai program tersebut akan menghasilkan dampak positif terhadap taraf kehidupan masyarakat.

PENGUNGKAPAN

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Satino, S.Sos., S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Kepemimpinan
2. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran kegiatan penelitian ini.

Besar harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
- UU No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
- PP No. 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
- Andari, A. D. (2024, February 16). 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya. Retrieved from <https://umsu.ac.id/artikel/4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya/>
- Kurnia, A. (2021). DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BELUI KECAMATAN DEPATI VII KABUPATEN KERINCI: ANISA KURNIA, HERLINDA, MASNON. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA*, 3(10), 22-30.
- Muda, P. K. (2023). "Menyongsong Indonesia Emas 2045: Tantangan, Potensi, dan.
- Nasional, B. P. P., & Nasional, B. P. P. (2014). Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan. *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta*.
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran setan kemiskinan dalam masyarakat pedesaan, studi kasus petani tembakau di kawasan pedesaan pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 120-127.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Saputra, W. A., & Mudakir, Y. B. (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Admin. (2023b, September 7). Data tak Valid, Penyaluran BLT Desa Berisiko Salah Sasaran. *WARTA DIGITAL*. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=44091>
- Andari, A. D. (2024, February 16). 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya. Diakses Pada 7 Mei 2024. <https://umsu.ac.id/artikel/4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya/>
- Indonesia, B. P. S. (2023, July 17). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses Pada 5 Mei 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

- Mendrofa, H. (2020, January 10). Menyoal Posisi Pekerja Sosial dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 Halaman 1 - Kompasiana.com. Diakses Pada 10 Mei 2024. <https://www.kompasiana.com/herrymendrofa/5e17cc57d541df77a1099262/menyoal-posisi-pekerja-sosial-dalam-uu-nomor-14-tahun-2019>
- Saputra, F. L. A. (2024, February 3). Sekelumit Cerita tentang Bansos dari Era SBY hingga Jokowi. *kompas.id*. Diakses pada 10 Mei 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/03/bansos-dari-orde-baru-sby-ke-jokowi>